

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- D.,Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Impelementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Dewanta, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad.2015.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris*.Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Fadjar, Mukthie. 2012. *Perihal Negara, Hukum Dan Kebijakan Publik*. Malang : Setara Press
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Manulang, Sendjun H. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*.Jakarta : PT. RINEKA CIPTA
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan kebijakan Publik*. Malang : Averroes Press
- Nazir,Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soekamto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Sumitro, Ronny Hanityo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Susanto, Joko. 2018. *Arahan Program Kegiatan Sektor Tahun 2020 di Bidang Ketenagakerjaan*. DIY : Bappeda. Hlm.3
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press
- Waluyo, Bambang. 2012. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*. Yogyakarta : MedPress

B. Internet :

https://nakertrans.jogjaprov.go.id/profil/c_profil, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 9.11 WIB

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42262077>, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pada pukul 17.35 WIB

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180126/98/730866/ini-lho-alasan-pembangunan-bandara-baru-yogyakarta> tanggal 14 Juni 2019, diakses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 19.03 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/3241278/deretan-alasan-kuat-yogyakarta-harus-segera-punya-bandara-baru>, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 17.49 WIB

<http://www.tribunnews.com/regional/2019/04/07/bandara-nyia-di-kulonprogo-akan-berganti-nama-menjadi-yogyakarta-international-airport> diakses pada 30 Mei 2019 pukul 15.01 WIB

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4117621/serap-1000-tenaga-kerja-konstruksi-andara-kulon-progo-dimulai> diakses pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 8.26 WIB

<https://jogjaprov.go.id/berita/detail/kulon-progo-sinergikan-kebutuhan-tenaga-kerja-dengan-angkasa-pura> diakses pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 21.28 WIB

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-daya-saing-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 22.13 WIB

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR PER.21/MEN/IX/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338)

Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 31)

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 61).

D. Peraturan Lainnya :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020. Bappeda DIY

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017- 2022

E. Sumber Referensi Lainnya :

Rasyid, Ali Nur. 2016. *Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Mengurangi Pengangguran di Kota Yogyakarta*. S1 Skripsi

Ismail, Muhammad. 2016. *Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita*. S1 Skripsi